

# ANALISIS PENGARUH KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**MUHAMMAD KHOZIN AHYAR**

Universitas Islam Indonesia  
E-mail: khozinahyar@gmail.com

## **Abstract**

*This article aims to analyze the effect of financial inclusion factors on third-party funds and Islamic banking customers. Islamic banking third-party funds as a result of financial inclusion and Islamic banking customers describe as access to Islamic banking to the public. This research is a type of quantitative research using data analysis techniques of the Vector Error Correction Model (VECM). This model is used in studies that have more than one dependent variable. This study results that the office network and deposit customers have no effect on Islamic banking deposits, while the ATM network affects Islamic banking deposits. The second dependent variable results in the ATM network influencing Islamic banking customers. The results of the analysis indicate that people consider the ATM factor in using savings products in Islamic banking. It also indicates that there has been a shift in the use of transaction models from office networks to ATM networks.*

*Keywords: Islamic banking, financial inclusion, third-party fund*

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor inklusi keuangan terhadap dana pihak ketiga dan nasabah perbankan syariah. Dana pihak ketiga perbankan syariah sebagai hasil dari inklusi keuangan dan menggambarkan nasabah perbankan syariah sebagai akses perbankan syariah kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data Vector Error Correction Model (VECM). Model ini digunakan pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel terikat. Hasil penelitian ini bahwa jaringan kantor dan simpanan nasabah tidak berpengaruh terhadap simpanan perbankan syariah, sedangkan jaringan ATM berpengaruh terhadap simpanan perbankan syariah. Hasil variabel dependen kedua jaringan ATM mempengaruhi nasabah perbankan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat mempertimbangkan faktor ATM dalam menggunakan produk tabungan di perbankan syariah. Hal tersebut juga mengindikasikan telah terjadi pergeseran penggunaan model transaksi dari jaringan kantor ke jaringan ATM

Kata kunci: Perbankan syariah, inklusi keuangan, dana pihak ketiga

## **PENDAHULUAN**

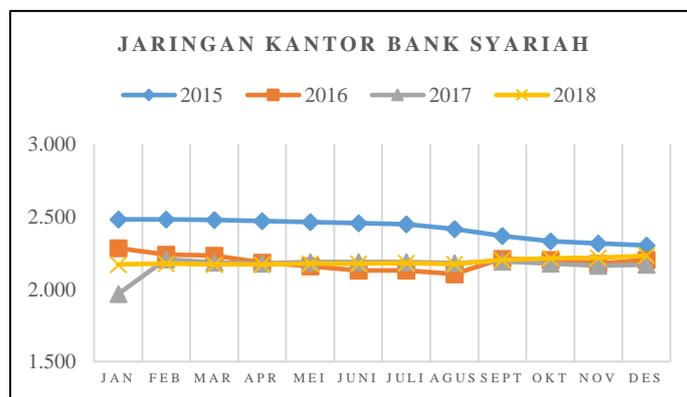
Keuangan inklusif merupakan keterjangkauan masyarakat di suatu negara terhadap produk dan jasa keuangan formal, seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan formal lainnya. Lebih lanjut, Bank Indonesia mendefinisikan keuangan inklusif sebagai hal setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif dan biaya terjangkau, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Keuangan inklusif pada dasarnya upaya yang dirancang untuk mengurangi atau meniadakan faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam menjangkau produk dan jasa lembaga

keuangan formal (Nasution et al., 2013). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 telah menyusun lima pilar yang menjadi dasar pelaksanaan keuangan inklusif (SNKI), yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen (Perpres, 2016). Keuangan inklusif diukur melalui tiga indikator, yaitu ketersediaan/akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan (BI, 2014). Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan indikator akses sebagai salah satu dimensi keuangan inklusif. Akses dapat mencerminkan kedalaman jangkauan layanan keuangan, seperti penetrasi cabang bank, ketersediaan ATM, biaya dan informasi (Soetiono & Setiawan, 2018).

Beberapa negara telah membuat komitmen untuk mengembangkan keuangan inklusif dan sebagian telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang kemudian dijadikan sebagai program prioritas (Soetiono & Setiawan, 2018). Model yang diadopsi setiap negara untuk meningkatkan inklusi keuangan berbeda-beda. India mengadopsi sistem teknologi dalam rangka meningkatkan inklusi keuangannya, seperti penggunaan *mobile banking*, *internet banking* dan lain sebagainya (Soetiono & Setiawan, 2018; Bharali & Borman, 2017). Indonesia tidak jauh berbeda dengan India dalam melaksanakan program keuangan inklusif. Indonesia juga mendorong Teknologi Finansial (Tekfin) dan Finansial Teknologi (Fintek) dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Disamping itu, otoritas di Indonesia (OJK dan BI) juga mendorong pemanfaatan agen perbankan di daerah-daerah yang kurang atau tidak terjangkau dengan kantor perbankan. Selain itu otoritas yang berwenang juga mendorong kepada seluruh pelaku industri keuangan di Indonesia agar dapat mengembangkan produk-produk yang mereka miliki. Harapannya kedepan masyarakat Indonesia lebih banyak lagi yang dapat memanfaatkan produk jasa keuangan, terutama produk perbankan. Sifatnya yang sangat global, membuat model Tekfin dan Fintek paling banyak diadopsi untuk meningkatkan inklusi keuangan disuatu negara. Disamping itu, dengan menggunakan teknologi masyarakat semakin mudah dalam menjangkau layanan keuangan.

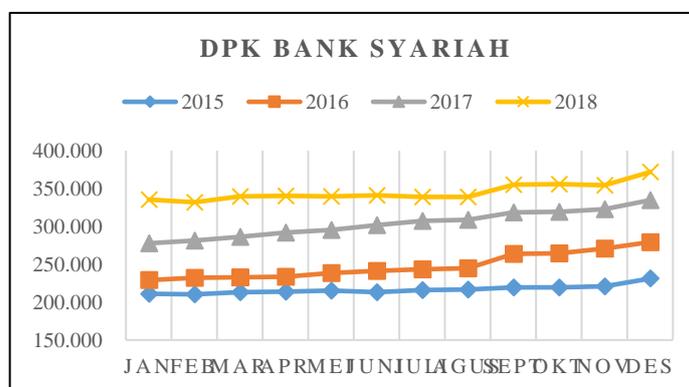
Penelitian tentang pengaruh keuangan inklusif terhadap DPK perbankan syariah masih sangat terbatas. Sebenarnya ada beberapa penelitian yang sudah mengarah pada salah satu dimensi akses keuangan inklusif, yaitu kantor layanan perbankan syariah, namun dengan dua variabel dependen yang berbeda, yaitu simpanan *mudharabah* dan atau deposito *mudharabah* (Rizki dkk., 2013; Hidayanti, 2016; Juniarty dkk., 2017; Novianto & Hadiwidjojo, 2013). Penelitian

tersebut memiliki hasil yang sama bahwa jumlah kantor bank atau kantor cabang akan mempengaruhi simpanan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dengan kata lain, jaringan kantor yang luas akan semakin menambah kesempatan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan produk jasa perbankan syariah. Senada dengan hal tersebut, Soetiono & Setiawan (2018) juga menyatakan bahwa semakin banyak kantor cabang lembaga keuangan atau ATM, maka semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan produk jasa keuangan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan data empiris yang membuktikan bahwa ketika jumlah jaringan kantor perbankan syariah menuruh, jumlah dana simpanan perbankan syariah (*wadiah* dan *mudharabah*) justru meningkat dari tahun ke tahun. Data empiris tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 1.** Jumlah Kantor Perbankan Syariah

Sumber: SPS-OJK 2015-2018 (Data Diolah)



**Gambar 2.** Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah

Sumber: SPS-OJK 2015-2018 (Data Diolah)

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap Perbankan Syariah di Indonesia. Perbankan Syariah dalam penelitian hanya berfokus pada Bank

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaringan kantor bank syariah, jaringan ATM, jumlah nasabah simpanan dan rekening simpanan sebagai variabel independen (proksi keuangan inklusif) serta DPK bank syariah sebagai variabel dependen. Seluruh data pada variabel-variabel tersebut dihimpun melalui laporan Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh OJK dan dipublikasi melalui *website* OJK.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Keuangan Inklusif**

Keuangan inklusif merupakan program penyediaan layanan keuangan formal kepada masyarakat yang masih belum atau bahkan tidak terjangkau terhadap lembaga keuangan formal (*unbankable*). Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (POJK, 2016). Sebenarnya, dunia internasional belum memiliki kesepakatan terkait definisi dari keuangan inklusif atau inklusi keuangan. Namun, Indonesia telah memiliki Perpres (Peraturan Presiden) yang memberikan definisi terkait keuangan inklusif. Menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2016, keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isu inklusi keuangan bukan hanya isu yang terjadi di Indonesia saja, akan tetapi isu tersebut juga menjadi isu global sejak tahun 2008, tepatnya sebelum terjadinya krisis finansial Amerika dan menjadi gencar sesudah terjadinya krisis tersebut. Program ini pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam mengakses layanan jasa keuangan formal. Secara eksplisit, program inklusi keuangan menasar pada tiga kategori penduduk, yaitu orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif dan orang hampir miskin (Bank Indonesia, 2014).

Implementasi inklusi keuangan di Indonesia sangat beragam, yang sebenarnya program tersebut telah dilaksanakan sejak lama. Salah satu implementasi program inklusi keuangan yang telah lama ada, yaitu koperasi dan Kredit Usaha Rakyat atau biasa dikenal dengan KUR (Wahid, 2014). Dua program ini secara tidak langsung sebenarnya dapat mendukung implementasi

inklusi keuangan. Disamping itu, adanya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) juga dapat membantu peningkatan inklusi keuangan di Indonesia (Nengsih, 2015). Selama ini pemerintah bersama otoritas hanya fokus kepada PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) yang skalanya besar, seperti perbankan, asuransi dan lain sebagainya. Padahal, sebenarnya program koperasi, KUR dan BMT juga dapat ikut andil dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, karena mereka punya segmentasi pasar menengah ke bawah.

Implementasi lain dari inklusi keuangan di Indonesia adalah program Laku Pandai, Simpel (Simpanan Pelajar), Laku Mikro, Asuransi Mikro, TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) dan lain sebagainya. Khusus perbankan, selama ini yang sedang berkembang adalah Laku Pandai dan Simpel. Laku Pandai merupakan singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Program ini resmi diluncurkan sekitar tahun 2015-2016, setelah diterbitkannya POJK Nomor 19/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif oleh Bank (DPNP-OJK, 2015). Laku Pandai merupakan program penyediaan layanan produk perbankan dan atau layanan keuangan lainnya melalui bekerjasama dengan pihak lain yang disebut dengan agen perbankan serta didukung dengan sarana teknologi informasi (DPNP-OJK, 2015). Program ini juga sebagai bagian dari pengembangan *branchless banking* yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia sejak Juni 2012 melalui SNKI (Strategi Nasional Keuangan Inklusif).

Pada dasarnya seluruh program implementasi inklusi keuangan harus berdasarkan pada prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip dasar dari inklusi keuangan adalah terukur, terjangkau, tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurut Perpres Nomor 82/2016, indikator keuangan inklusif dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi, yaitu akses, penggunaan dan kualitas. Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi akses dan penggunaan.

Akses merupakan salah satu dimensi indikator yang ada dalam inklusi keuangan. Perpres Nomor 82/2016 menyebutkan bahwa akses merupakan kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal baik dalam hal keterjangkauan fisik dan biaya. Rifa'i (2017) juga menyebutkan bahwa yang dimaksud akses adalah kemampuan bank untuk menjangkau masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan formal baik dalam hal menabung maupun memperoleh pembiayaan serta layanan keuangan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut,

maka terdapat beberapa hal yang terkait dengan indikator dalam dimensi akses yang dapat menggambarkan akses dalam inklusi keuangan, yaitu akses fisik, akses biaya, akses terhadap produk simpanan dan akses terhadap produk pembiayaan. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan akses fisik untuk menggambarkan keterjangkauan perbankan syariah di Indonesia.

Menurut Fahrudin & Yulianti (2015) lokasi kantor bank dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih atau membeli suatu produk perbankan. Sejalan dengan pernyataan tersebut, (Darmawan et al., 2019) juga menyatakan hal yang sama bahwa lokasi menjadi salah satu faktor penting nasabah untuk menabung di bank. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jarak keberadaan jaringan kantor perbankan sangat mempengaruhi sebagian besar masyarakat untuk memutuskan pilihan menggunakan layanan produk perbankan. Tidak hanya sebatas jaringan kantor bank/kantor cabang dalam mendukung inklusi keuangan. Sarana atau infrastruktur lain yang dapat dijadikan untuk mendorong inklusi keuangan adalah jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Penggunaan ATM pada masa sekarang menjadi sangat penting untuk mendukung transaksi keuangan di Indonesia. Keberadaan ATM dapat menjadikan nasabah lebih mudah dalam bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Operasional ATM selama 24 jam menjadikan nasabah lebih nyaman dalam melakukan transaksi setiap saat. Sehingga nasabah tetap dapat bertransaksi secara normal walaupun jaringan kantor bank sedang libur atau tidak beroperasi. Indikator dari dimensi akses akan mencerminkan kedalaman jangkauan layanan keuangan, seperti penetrasi cabang bank di daerah (Soetiono & Setiawan, 2018).

Masyarakat diharapkan agar memiliki serta dapat menggunakan rekening simpanan pada lembaga keuangan formal. Ketika masyarakat dapat menggunakan rekening, maka secara langsung akan mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga yang ada di bank syariah. Masyarakat saat ini sudah dapat dengan mudah untuk memiliki dan menggunakan layanan keuangan formal. Memiliki rekening simpanan pada bank saat ini sudah dapat dilakukan melalui *mobile phone* atau *smartphone*. Disamping itu, keberadaan program laku pandai juga semakin mempermudah masyarakat untuk memiliki rekening simpanan di bank serta menggunakannya dalam berbagai transaksi sehari-hari.

Penggunaan layanan keuangan melalui laku pandai dapat memudahkan masyarakat dalam menggunakan berbagai macam produk keuangan bank. Berdasarkan Data Perkembangan Program Laku Pandai per September 2019, jumlah agen laku pandai mencapai 1.146.131 agen

yang berasal dari 27 Bank Umum Konvensional dan 4 Bank Umum Syariah (OJK, 2019). Kemudian, jumlah *outsanding* tabungan yang berhasil dihimpun sebesar Rp 2.218 Miliar dengan jumlah nasabah sebesar 25.777.824 rekening (nasabah). Perkembangan yang cukup signifikan pada program tersebut tidak lepas dari beberapa faktor, yaitu manfaat pelanggan, kepercayaan pelanggan serta pendidikan (Jaya & Setiawina, 2018). Disamping itu, Al Arif & Firmansyah (2018) menyatakan bahwa program laku pandai dapat meningkatkan dana pihak ketiga pada BRI Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa program laku pandai cukup efektif untuk meningkatkan penggunaan produk tabungan, terutama pada rekening tabungan syariah. Tidak hanya penggunaan, akan tetapi juga dapat meningkatkan DPK yang ada di bank syariah. Dengan demikian, potensi untuk meningkatkan penggunaan masyarakat terhadap produk tabungan syariah masih dapat ditingkatkan, tanpa perlu mendirikan jaringan kantor yang memerlukan biaya cukup mahal.

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah merupakan lembaga yang berfokus pada pemberian berbagai layanan keuangan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, baik kelembagaan maupun kegiatan usahanya. Perbankan syariah merupakan bagian dari keuangan Islam, sehingga biasanya seluruh aktifitas keuangan Islam dipelopori dan dipimpin oleh perbankan syariah. Secara garis besar, perbankan syariah dapat melayani tiga jenis layanan produk, yaitu pendanaan/*funding*, pembiayaan/*financing* dan jasa/*services* (Ascarya, 2013).

Layanan produk pendanaan (*funding*) pada bank syariah umumnya memiliki tiga jenis produk, yaitu tabungan/simpanan, deposito dan giro. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 20 (simpanan), ayat 21 (tabungan), ayat 22 (deposito) dan ayat 23 (giro). Tabungan dalam perbankan syariah didefinisikan sebagai simpanan yang berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan alat atau sarana tertentu (UU, 2008). Serupa dengan definisi tabungan, giro sendiri merupakan produk simpanan yang dimiliki oleh perbankan syariah, akan tetapi penarikan dananya dapat dilakukan dengan menggunakan sarana tertentu, seperti cek, bilyet giro atau sarana perintah lain yang dipersamakan dengan itu.

Pada umumnya dalam aplikasi di perbankan syariah, tabungan dan giro menggunakan dua akad, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Perbedaan keduanya hanya terletak pada akad serta manfaat yang didapat oleh nasabah. Nasabah dengan akad *mudharabah* sudah pasti akan mendapatkan manfaat, yaitu berupa bagi hasil. Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil karena konsep yang digunakan dalam simpanan tersebut adalah menabung/menyimpan dana sekaligus berinvestasi. Jika menggunakan akad *wadiah*, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil, karena konsep dari *wadiah* adalah titipan atas harta nasabah. Sehingga nasabah memberikan kepercayaan untuk menitipkan atau menyimpan hartanya kepada bank syariah. Namun, nasabah bisa mendapatkan bonus apabila bank syariah memberikan kebijakan untuk membagikan bonus kepada nasabah pemegang rekening *wadiah* dan itu tidak boleh diperjanjikan oleh bank syariah ketika awal pelaksanaan akad.

Deposito pada perbankan syariah didefinisikan sebagai produk investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi (nasabah dan bank syariah). Pada praktiknya, deposito pada bank syariah dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu secara otomatis sebagai fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Fasilitas tersebut biasa disebut dengan ARO (*Automatic Roll Over*). Disamping ARO, deposito di bank syariah umumnya juga memiliki fasilitas *automatic transfer* atas bagi hasil yang diterima dari investasi deposito.

Perbankan syariah di Indonesia saat ini sedang mengejar ketertinggalan dari pendahulunya, yaitu perbankan konvensional. Pada akhirnya, per Oktober dan November 2019 ini, perbankan syariah berhasil meraih pangsa pasar atau *market share* sebesar 6% (Sitanggang, 2019). Peningkatan *market share* yang dicapai saat ini tidak lepas dari beberapa kejadian yang terjadi selama tahun 2019, antara lain penerapan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penerapan Qanun Aceh tentang LKS ini memaksa lembaga keuangan yang berada di Aceh untuk mengkonversi sistemnya kepada syariah. Sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan aset perbankan syariah nasional.

Pencapaian ini merupakan perjalanan panjang dari perbankan syariah di Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya. Beberapa ketertinggalan perbankan syariah yang harus dikejar agar bisa bersaing dengan perbankan konvensional, antara lain teknologi, inovasi dan pengembangan produk hingga sumber daya manusia. Disamping hal-hal tersebut, perbankan syariah juga harus

meningkatkan keterjangkauan nasabah terhadap seluruh layanan-layanannya. Sebab, beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa lokasi atau jarak jaringan kantor perbankan syariah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam keputusan nasabah dalam memilih bank syariah (Fahrudin & Yulianti, 2015; Ouma et al., 2017; Pertiwi & Ritonga, 2012; Qodriyah, 2016). Keterjangkauan tersebut dapat berupa jaringan kantor serta jaringan ATM (Hidayanti, 2016; Juniarty et al., 2017; Kim et al., 2018). Seluruh problematika tersebut menjadi suatu tantangan bagi bank syariah untuk dapat lebih berkembang dan meningkatkan kinerja mereka, sehingga dapat bersaing dengan perbankan konvensional.

### **Dana Pihak Ketiga**

Kegiatan perbankan syariah ditopang oleh tiga sumber dana, yaitu modal utama atau modal inti sebagai *tier 1*, modal pelengkap sebagai *tier 2* (Muhamad, 2015) dan dana nasabah atau yang biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak ketiga merupakan hasil dari kegiatan *funding* pada perbankan syariah. *Funding* atau pendanaan merupakan kegiatan bank syariah dalam mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat. Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perseorangan maupun lembaga/institusi dengan menggunakan beberapa produk atau instrumen, meliputi tabungan, giro dan deposito. Dana pihak ketiga menjadi sumber kekuatan dari perbankan, baik konvensional maupun syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Prasetya et al., 2015). Semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah, akan semakin besar kesempatan perbankan syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Disamping itu, perbankan syariah juga akan semakin berpotensi besar untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnisnya.

Perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir (Grafik 2). Perkembangan DPK yang cukup signifikan pada perbankan syariah beberapa tahun belakangan ditopang oleh inovasi produk serta layanan yang ditawarkan agar dapat lebih menjangkau masyarakat. Pemberian fasilitas *e-channel* perbankan kepada nasabah dapat memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah. Kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat yang semakin gencar dilakukan oleh berbagai pihak juga menjadi penopang pertumbuhan DPK perbankan syariah.

Sumber dana perbankan syariah yang berasal dari DPK juga merupakan dampak dari karakter atau perilaku masyarakat yang tertarik dan memutuskan untuk menggunakan produk simpanan di perbankan syariah. Direktur BRI Syariah, Koko Alun Akbar dalam suatu wawancara menyatakan bahwa berdasarkan survei, 65% nasabah bank konvensional akan berpindah ke bank syariah apabila bank syariah memiliki jangkauan yang luas setara dengan bank konvensional (Septyaningsih, 2019). Keterjangkauan nasabah dengan perbankan syariah merupakan salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang harus dihadapi oleh pelaku industri. Keterjangkauan ini menggambarkan bahwa akses merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan DPK. Akses atau jangkauan yang mudah akan mendorong masyarakat agar memilih perbankan syariah sebagai mitra dalam bertransaksi dan penggunaan layanan keuangan. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan DPK perbankan syariah.

Pertumbuhan *outlet* atau jaringan kantor memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan DPK perbankan syariah di Indonesia (Prasetya et al., 2015; Putri & Yusuf, 2017). Walaupun begitu, pengembangan teknologi sangat dibutuhkan kedepan agar tetap dapat mendorong pertumbuhan DPK. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung bonus demografi Indonesia di masa depan yang mayoritas merupakan generasi milenial serta mendorong mereka untuk menggunakan produk dan layanan di perbankan syariah, terutama produk simpanan. Kebutuhan pengembangan teknologi untuk mendukung *branchless banking* akan memiliki dampak yang positif terhadap kinerja perbankan, terutama perbankan syariah (Margaretha, 2015; Sarah, 2015).

Program laku pandai merupakan salah satu dari implementasi pengembangan *branchless banking*. Pemanfaatan agen bank dan teknologi akan menjadi salah satu solusi untuk meluaskan akses layanan keuangan kepada seluruh masyarakat tanpa harus membangun atau mendirikan jaringan kantor, baik cabang, cabang pembantu maupun kantor kas. Sehingga akan berdampak pada peningkatan DPK perbankan, terutama perbankan syariah. Keberadaan program laku pandai dapat mendorong pertumbuhan DPK di perbankan syariah (Al Arif & Firmansyah, 2018). Namun, perbankan syariah yang ikut serta dalam program laku pandai masih sangat sedikit. Berdasarkan laporan OJK per September 2019, sampai dengan saat ini bank syariah yang ikut serta dalam program laku pandai hanya ada 4 Bank Umum Syariah, yaitu BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BPD NTB Syariah (hasil konversi) dan BTPN Syariah.

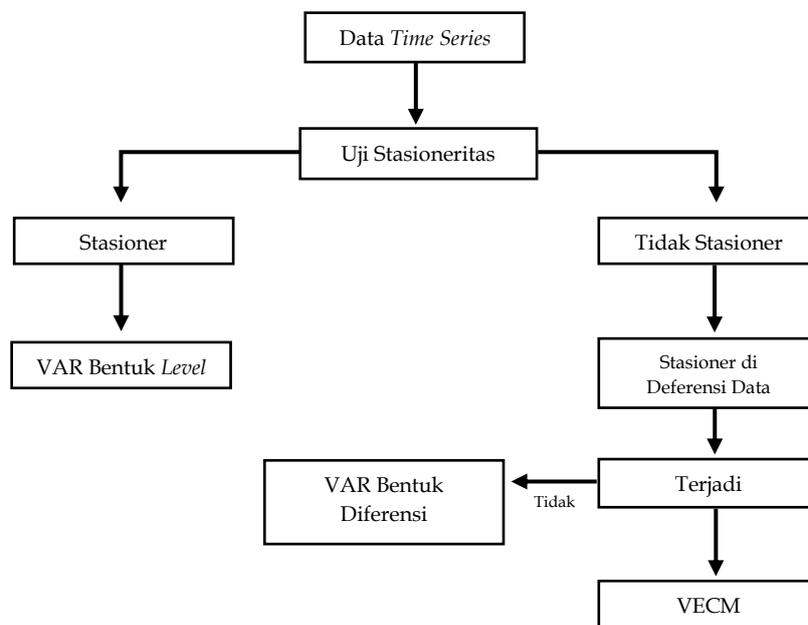
## **METODOLOGI PENELITIAN**

### Populasi dan Sampel Data

Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia, sedangkan sampel yang digunakan sebagai fokus dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2018. Seluruh data yang digunakan diperoleh penulis melalui Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan model VAR (*Vector Autoregression*). VAR merupakan model regresi non struktural yang diperuntukkan bagi data yang bersifat *time series*. Pembentukan model VAR dapat dilihat melalui gambar berikut:



**Gambar 3.** Model Pembentukan VAR

Sumber: Widarjono, 2018

Pembentukan model VAR diawali dengan melakukan uji stasioneritas data *time series* yang digunakan dalam penelitian. Kemudian, apabila data tersebut stasioner pada kategori level, maka model yang digunakan adalah VAR dalam bentuk level. Namun, apabila data *time series* yang digunakan tidak stasioner pada kategori level, akan tetapi stasioner pada kategori diferensi data (*1<sup>st</sup> difference & 2<sup>nd</sup> difference*), maka selanjutnya yang dilakukan adalah uji kointegrasi. Setelah dilakukan uji kointegrasi, apabila hasilnya adalah terjadi kointegrasi, maka model yang digunakan adalah VECM (*Vector Error Correction Model*). Namun, apabila tidak terjadi kointegrasi, maka model yang digunakan adalah VAR dalam bentuk diferensi.

### **Uji Stasioner**

Uji stasioner sangat penting dalam suatu analisis data *time series*. Sebuah data dinyatakan *time series* jika memiliki mean konstan, varians konstan dan otokovarians konstan untuk sistem lag tertentu atau dikenal dengan konsep *weak stationarity* (Hakim, 2017). Pengujian stasioneritas dilakukan menggunakan uji akar (*unit root test*) dengan *Augmented Dickey Fuller (ADF) test*. Pada uji stasioneritas, data diuji terlebih dahulu, apakah data tersebut stasioner pada derajat *in level*, *first difference* atau *second difference*.

### **Uji Kointegrasi**

Uji kointegrasi merupakan uji yang dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel pada data serta melihat pengaruh jangka panjang pada variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji kointegrasi dapat digunakan untuk melihat apakah sistem  $e$  yang digunakan dalam penelitian memiliki hubungan antar sistem  $e$ . Uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah sistem  $e$  yang digunakan memiliki hubungan keseimbangan jangka sistem (Hakim, 2017).

### **Uji VAR (VECM)**

Uji VAR digunakan untuk melihat apakah data variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel yang lain. Angka atau nilai yang berada dalam tanda  $()$  merupakan *standard error*, sedangkan nilai yang berada dalam tanda  $[\ ]$  merupakan nilai t-uji. Variabel akan berpengaruh apabila nilai t-uji lebih dari dua (Hakim, 2017).

### **Interpretasi Impulse Response**

*Impulse response* merupakan salah satu sistem yang digunakan dalam membantu menginterpretasikan hasil estimasi VAR (*Vector Autoregression*). Analisis *impulse response* digunakan untuk melacak respon dari sistem  $e$  endogen di dalam sistem VAR, karena adanya gonjangan (*shocks*) atau perubahan di dalam sistem  $e$  gangguan atau eror (Widarjono, 2018).

### **Interpretasi Variance Decomposition**

Teknik analisis *variance decomposition* berguna untuk memprediksi kontribusi prosentase varian setiap sistem  $e$  karena adanya perubahan sistem  $e$  tertentu di dalam sistem VAR (Widarjono, 2018).

### **Interpretasi Granger Causality Test**

Teknik analisis ini akan memperlihatkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini dapat membantu penulis dalam

melihat pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada hasil output analisis *views* akan menampilkan tabel yang berisikan hipotesis nol ( $H_0$ ), jumlah observasi, t-statistik dan probabilitas.

## HASIL & PEMBAHASAN

### Uji Stasioner

Terdapat tiga kategori data dalam melakukan uji stasioner, yaitu kategori level, *1<sup>st</sup> difference* dan *2<sup>nd</sup> difference* dengan nilai alpha atau nilai kritis sebesar 5% (0,05). Suatu data hasil proses random dikatakan stasioner jika memenuhi tiga kriteria, yaitu apabila rata-rata konstan sepanjang waktu, varian konstan sepanjang waktu dan kovarian antara dua data *time series* hanya tergantung dari kelambanan antara dua periode waktu tersebut (Widarjono, 2018). Uji stasioner data *time series* tersebut menggunakan model yang dikembangkan oleh Augmented Dickey-Fuller (ADF). Hasil pengujian stasioner terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Hasil Uji Stasioner

Variabel	Level	<i>1<sup>st</sup> Difference</i>	<i>2<sup>nd</sup> Difference</i>
DPK	0.2553	0.1740	0.0000*
Jaringan Kantor	0.8763	0.0000*	-
ATM	0.4637	0.0001*	-
Nasabah	0.0848	0.0000*	-

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas variabel stasioner pada kategori *1<sup>st</sup> difference*, kecuali pada variabel DPK yang stasioner pada kategori *2<sup>nd</sup> difference*. Data dapat dikatakan stasioner apabila nilai probabilitasnya berada dibawah nilai kritis, yaitu 5% (0,05). Dikarenakan data variabel penelitian yang digunakan oleh penulis tidak stasioner pada kategori level, maka tidak dapat menggunakan model VAR dalam bentuk level. Selanjutnya data perlu dilakukan uji kointegrasi untuk melihat hubungan antar variabel.

### Uji Kointegrasi

Setelah melakukan tahapan uji stasioneritas pada variabel peneltian dengan hasil non stasioner pada level dan stasioner pada kategori diferensi, maka pengujian dilanjutkan dengan uji kointegrasi. Uji kointegrasi menggunakan model yang dikembangkan oleh Johansen dengan *lag interval 1 to 1*. Hasil uji kointegrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Hasil Uji Kointegrasi

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.564243	78.78941	69.81889	0.0081*
At most 1	0.287452	40.57856	47.85613	0.2025
At most 2	0.235868	24.98880	29.79707	0.1618
At most 3	0.153857	12.61416	15.49471	0.1297
At most 4 *	0.101612	4.929059	3.841466	0.0264*

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

\* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

\*\*MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.564243	38.21085	33.87687	0.0142*
At most 1	0.287452	15.58975	27.58434	0.7003
At most 2	0.235868	12.37465	21.13162	0.5111
At most 3	0.153857	7.685096	14.26460	0.4116
At most 4 *	0.101612	4.929059	3.841466	0.0264*

Sumber: Data Diolah

Pada tabel bagian atas menunjukkan uji statistik kointegrasi dengan *trace statistic*, sedangkan pada tabel bagian bawah melaporkan *max-eigenvalues statistic*. Berdasarkan uji *trace statistic* dan *maximum eigenvalue statistic* menunjukkan adanya kointegrasi dengan tingkat signifikansi alpha sebesar 5% (0,05). Nilai probabilitas yang bertanda bintang (\*) dan berwarna kuning menunjukkan bahwa terjadinya kointegrasi karena nilai probabilitas berada dibawah atau kurang dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan hasil uji tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian terjadi kointegrasi, sehingga model yang digunakan adalah *Vector Error Correction Model* (VECM).

### Uji VECM

Pengujian selanjutnya yang dilakukan yaitu uji VECM seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.** Hasil Uji VECM Jangka Panjang

Cointegrating Eq:	CointEq1
----------------------	----------

DPK(-1)		1.000000	
KTR(-1)	-101.3755	(13.3432)	<b>[-7.59753]</b>
ATM(-1)	16.48391	(2.82801)	<b>[5.82881]</b>
NSB(-1)	-0.014153	(0.00052)	<b>[-27.2010]</b>

Sumber: Data Diolah

Tabel 3 merupakan hasil dari regresi jangka panjang hubungan antar seluruh variabel yang ada dalam penelitian yang didasarkan pada uji kointegrasi. Pada tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa nilai uji t yang berada dalam tanda [] dan berwarna kuning melebihi angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berpengaruh dalam jangka panjang. Selanjutnya, hasil estimasi regresi VAR dengan model VECM dalam jangka pendek dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4.** Hasil Uji VECM Persamaan DPK

D(DPK(-1))			
D(DPK)	D(KTR)	D(ATM)	D(NSB)
-0.333442	0.003821	0.024526	-4.050067
(0.24301)	(0.00213)	(0.01074)	(27.9418)
[-1.37213]	[ 1.79060]	<b>[2.28411]</b>	[-0.14495]
D(DPK(-2))			
-0.167753	0.001226	0.003034	-10.35734
(0.20657)	(0.00181)	(0.00913)	(23.7516)
[-0.81209]	[ 0.67584]	[ 0.33235]	[-0.43607]

Sumber: Data Diolah

Tabel 4 merupakan tabel hasil dari estimasi regresi VECM pada persamaan DPK (Dana Pihak Ketiga). Berdasarkan uji t, hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap DPK, yaitu ATM.

**Tabel 5.** Hasil Uji VECM Persamaan NSB

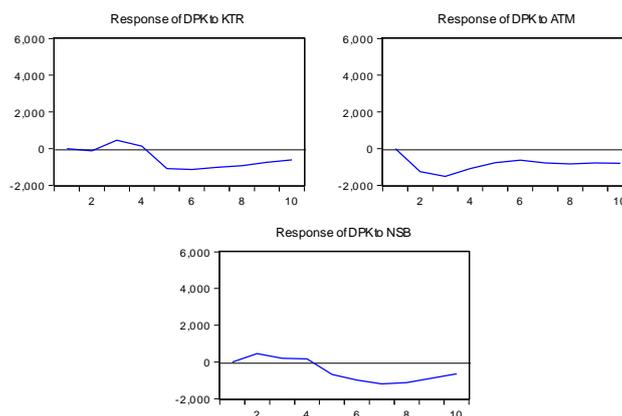
D(NSB(-1))
------------

D(DPK)	D(KTR)	D(ATM)	D(NSB)
-0.000664 (0.00202) [-0.32943]	1.24E-05 (1.8E-05) [ 0.70209]	-6.05E-05 (8.9E-05) [-0.67916]	-0.104067 (0.23182) [-0.44891]
D(NSB(-2))			
0.002256 (0.00226) [ 0.99793]	-8.01E-06 (2.0E-05) [-0.40366]	-0.000300 (0.00010) [-3.00119]	0.410157 (0.25990) [ 1.57813]

Sumber: Data Diolah

Tabel 5 merupakan hasil estimasi regresi VECM pada persamaan NSB (Nasabah). Berdasarkan uji t, terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap NSB, yaitu ATM.

**Interpretasi Impulse Response**

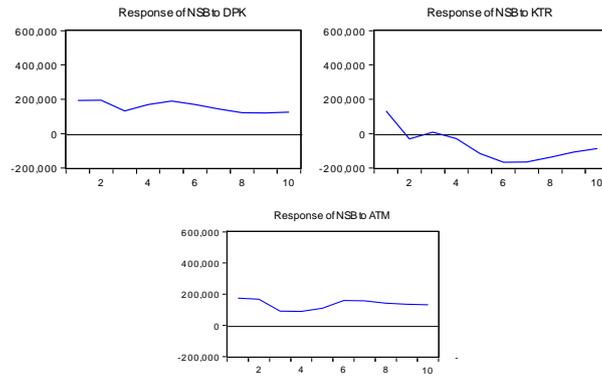


**Gambar 4.** Hasil Analisis Impulse Response DPK

Sumber: Data Diolah

Gambar 4 diatas menunjukkan bagaimana respons dari variabel DPK ketika empat variabel lainnya mengalami *shock*. Grafik pertama (atas kiri) menjelaskan bahwa ketika terjadi *shock* pada jaringan kantor perbankan syariah (KTR), DPK mengalami peningkatan pada awal periode. Ketika memasuki pertengahan periode, DPK mengalami penurunan hingga berada pada posisi negatif. Menjelang akhir periode hingga akhir periode DPK mengalami peningkatan, walaupun masih berada pada posisi negatif. Pada grafik selanjutnya (kanan atas) menjelaskan bahwa ketika ATM mengalami *shock*, DPK merespon negatif sejak awal periode hingga akhir periode. Sebenarnya pada pertengahan periode DPK mengalami peningkatan, akan tetapi posisi responnya tetap negatif.

Pada grafik selanjutnya (bawah) menggambarkan bahwa ketika NSB mengalami *shock*, maka DPK mengalami peningkatan pada awal periode. Pada pertengahan periode PDK terus mengalami penurunan hingga berada pada posisi negatif. Peningkatan kembali terjadi menjelang akhir periode hingga akhir periode, akan tetapi respon DPK masih berada pada posisi negatif.



**Gambar 5.** Hasil Analisis *Impulse Response* NSB

Sumber: Data Diolah

Gambar 5 menggambarkan respon dari NSB perbankan syariah akibat dari adanya *shock* yang terjadi pada variabel lain dalam penelitian. Grafik pertama (kiri atas) memberikan gambaran respon NSB terhadap *shock* yang terjadi pada DPK perbankan syariah. Pada periode pertama NSB mengalami penurunan hingga periode ketiga. Pada periode selanjutnya NSB mengalami peningkatan hingga periode kelima akibat dari adanya *shock* pada DPK perbankan syariah. Penurunan NSB kembali terjadi mulai dari periode keenam hingga akhir periode. Grafik kedua (kanan atas) memberikan gambaran respon NSB terhadap *shock* yang terjadi pada KTR perbankan syariah. NSB mengalami penurunan sejak awal periode hingga periode ketujuh, sehingga respon NSB berada pada posisi yang negatif. Periode selanjutnya, NSB mengalami peningkatan, akan tetapi masih berada posisi respon yang negatif.

Grafik ketiga (bawah) menggambarkan respon NSB terhadap *shock* yang terjadi pada variabel ATM. Secara keseluruhan, respon NSB terhadap *shock* yang dialami oleh ATM adalah positif. Pada awal periode NSB mengalami penurunan hingga periode ketiga, kemudian mengalami kenaikan pada periode selanjutnya hingga periode ketujuh. Penurunan kembali terjadi pada akhir periode, akan tetapi tetap dalam posisi respon yang positif.

**Interpretasi *Variance Decomposition***

**Tabel 6.** Hasil Uji *Variance Decomposition* DPK

<i>Variance Decomposition of DPK:</i>					
Period	S.E.	DPK	KTR	ATM	NSB

1	4865.723	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	5711.963	93.86862	0.042873	4.904079	0.641772
3	6400.497	88.59608	0.544552	9.522163	0.605535
4	7419.676	89.09727	0.435913	9.243428	0.502662
5	8360.282	87.84867	2.027386	8.119885	1.058004
6	9086.862	86.05737	3.297557	7.349736	2.093051
7	9747.459	84.24764	3.979065	7.036111	3.332959
8	10333.42	82.98185	4.353206	6.922142	4.151984
9	10841.51	82.56512	4.437764	6.808053	4.448523
10	11305.59	82.60679	4.381169	6.771617	4.418563

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 6 memperlihatkan kontribusi prosentase varian dari setiap variabel karena adanya perubahan pada variabel DPK. Pada periode pertama, varian DPK dijelaskan oleh variabel itu sendiri sebesar 100%. Pada periode kedua, varian DPK dijelaskan oleh variabel itu sendiri sebesar 93.87%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Masing-masing variabel memiliki kontribusi sebesar 0.04% (KTR), 4.90% (ATM) dan 0.64% (NSB). Pada periode ketiga, varian DPK dijelaskan oleh DPK sebesar 88,60%, KTR 0,54%, ATM 9,52% dan NSB 0,60%. Periode keempat varian DPK dijelaskan oleh variabel DPK sebesar 89,10%, KTR 0,43%, ATM 9,24% dan NSB 0,50%. Periode kelima varian DPK dijelaskan oleh variabel DPK sebesar 87,85%, KTR 2,03%, ATM 8,12%, NSB 1,06% dan REK 0,95%.

Periode keenam varian DPK dijelaskan oleh variabel DPK sebesar 86,06%, KTR 3,30%, ATM 7,35% dan NSB 2,09%. Periode ketujuh varian DPK dijelaskan oleh variabel DPK sebesar 84,25%, KTR 3,98%, ATM 7,04% dan NSB 3,33%. Periode kedelapan varian DPK dijelaskan oleh variabel DPK sebesar 82,98%, KTR 4,35%, ATM 6,92% dan NSB 4,15%. Periode kesembilan varian DPK dijelaskan oleh variabel DPK sebesar 82,56%, KTR 4,44%, ATM 6,81% dan NSB 4,45%. Periode kesepuluh varian DPK dijelaskan oleh variabel DPK sebesar 82,61%, KTR 4,38%, ATM 6,77% dan NSB 4,42%.

**Tabel 7.** Hasil Uji *Variance Decomposition* NSB

<i>Variance Decomposition of NSB:</i>					
Period	S.E.	DPK	KTR	ATM	NSB

1	559470.0	11.91050	5.596312	9.685797	72.80739
2	708442.0	14.96464	3.674148	11.67725	68.76573
3	829131.0	13.46424	2.691179	9.738030	73.11093
4	897770.7	15.05782	2.402207	9.320000	70.89698
5	960912.7	17.04380	3.549659	9.445624	66.98965
6	1023396.	17.74091	5.813987	10.75868	61.43592
7	1074822.	17.89381	7.634060	11.90117	57.45928
8	1118572.	17.71607	8.583989	12.59972	55.10281
9	1159876.	17.55501	8.837472	13.09925	53.77931
10	1204162.	17.37681	8.724686	13.35588	53.36612

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 7 memperlihatkan kontribusi prosentase varian dari setiap variabel karena adanya perubahan pada variabel NSB. Pada periode pertama, varian NSB dijelaskan oleh variabel itu sendiri sebesar 72.81% dan sisanya dijelaskan oleh variabel DPK, KTR dan ATM sebesar 11.91%, 5.60% dan 9.68%. Pada periode kedua, varian NSB dijelaskan oleh variabel itu sendiri sebesar 68.76%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Masing-masing variabel memiliki kontribusi sebesar 14.96% (DPK), 3.67% (KTR) dan 11.68% (ATM). Periode ketiga varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 73.11%, DPK 13.46%, KTR 2.69% dan ATM 9.74%. Periode keempat varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 70.90%, DPK 15.06%, KTR 2.40% dan ATM 9.32%. Periode kelima varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 66.99%, DPK 17.04%, KTR 3.55% dan ATM 9.44%.

Periode keenam varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 61.43%, DPK 17.74%, KTR 5.81% dan ATM 10.76%. Periode ketujuh varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 57.46%, DPK 17.89%, KTR 7.63% dan ATM 11.90%. Periode kedelapan varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 55.10%, DPK 17.72%, KTR 8.58% dan ATM 12.60%. Periode kesembilan varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 53.78%, DPK 17.55%, KTR 8.84% dan ATM 13.10%. Periode kesepuluh varian NSB dijelaskan oleh variabel NSB sebesar 53.37%, DPK 17.38%, KTR 8.72% dan ATM 13.35%.

**Interpretasi Granger Causality Test**

**Tabel 8.** Hasil Analisis Granger Causality Test

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
------------------	-----	-------------	-------

KTR does not Granger Cause DPK	46	1.69618	0.1960
DPK does not Granger Cause KTR		0.35545	0.7030
ATM does not Granger Cause DPK	46	6.34465	0.0040*
DPK does not Granger Cause ATM		1.30284	0.2828
ATM does not Granger Cause KTR	46	5.98267	0.0053*
KTR does not Granger Cause ATM		8.15834	0.0010*
NSB does not Granger Cause ATM	46	1.58308	0.2176
			0.0399*
ATM does not Granger Cause NSB		3.48892	*
NSB does not Granger Cause KTR	46	0.05203	0.9494
KTR does not Granger Cause NSB		0.96960	0.3878

Sumber: Data Diolah

Tabel 8 merupakan hasil analisis dengan teknik granger kausalitas. Dapat dilihat pada kolom probabilitas, nilai yang memiliki tanda bintang (\*), (\*\*), dan (\*\*\*) merupakan hipotesis yang ditolak pada tingkat signifikansi 1% (0,01), 5% (0,05) dan 10% (0,10). Nilai probabilitas yang tidak memiliki tanda bintang bermakna bahwa hipotesis tersebut gagal ditolak atau diterima.

Pada hipotesis pertama dan kedua (variabel KTR dan DPK), keduanya tidak memiliki hubungan kausalitas, baik satu arah maupun dua arah. Hipotesis nol (H0) ketiga memiliki nilai probabilitas sebesar (0,0040), nilai tersebut memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai signifikansi sebesar 1% ( $0,0040 < 0,01$ ). Nilai probabilitas yang lebih kecil daripada alpha dapat menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ATM memiliki hubungan kausalitas satu arah terhadap DPK perbankan syariah. Hipotesis nol (H0) kelima dan keenam memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0053 dan 0.0010, nilai tersebut lebih kecil daripada nilai alpha sebesar 1% ( $0,0053 < 0,01$ ) dan ( $0,0010 < 0,01$ ). Dengan demikian H0 dapat ditolak, sehingga disimpulkan bahwa ATM dan KTR memiliki hubungan kausalitas dua arah.

Hipotesis kedelapan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0399. Nilai tersebut lebih kecil daripada nilai alpha sebesar 5% ( $0,0399 < 0,05$ ). Dengan demikian, H0 dapat ditolak, sehingga disimpulkan bahwa ATM memiliki hubungan kausalitas satu arah terhadap NSB. Pada hipotesis terakhir (variabel NSB dan KTR), keduanya tidak memiliki hubungan kausalitas, baik satu arah maupun dua arah.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Jaringan Kantor

Jaringan kantor perbankan syariah merupakan kantor pelayanan perbankan syariah untuk berbagai macam transaksi keuangan. Jaringan kantor perbankan syariah terdiri dari Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). Berdasarkan hasil analisis regresi VECM pada bagian sebelumnya (tabel 4) bahwa jaringan kantor perbankan syariah tidak memiliki pengaruh terhadap DPK perbankan syariah di Indonesia. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah kantor berpengaruh terhadap produk simpanan perbankan syariah, yang mana produk tersebut merupakan bagian dari Dana Pihak Ketiga (Prasetya et al., 2015). Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jaringan kantor perbankan syariah tidak dapat menambah jumlah DPK yang ada di perbankan syariah.

Jaringan kantor perbankan syariah merupakan gambaran dari ketersediaan akses perbankan syariah kepada masyarakat luas. Ketersediaan akses yang luas dapat mempermudah masyarakat ataupun nasabah dalam melakukan berbagai transaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Qodriyah (2016) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat memilih perbankan yang aksesnya lebih terjangkau. Sehingga mereka dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan transaksi keuangan di perbankan. Menurut (Soetiono & Setiawan, 2018) layanan kantor lembaga keuangan merupakan bagian dari titik akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan uji granger kausalitas, jaringan kantor perbankan syariah dan jaringan ATM memiliki hubungan dua arah atau hubungan sebab akibat. Hal tersebut dikarenakan mayoritas jaringan ATM yang dimiliki oleh perbankan syariah hanya berada di jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbeda dengan perbankan konvensional yang jaringan ATM-nya telah tersebar di seluruh wilayah, seperti di swalayan, minimarket, *rest area* dan lain sebagainya.

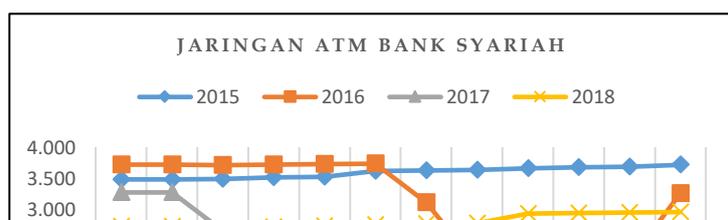
Berdasarkan uji VECM, jaringan kantor perbankan syariah, variabel jaringan kantor perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap jumlah nasabah. Hal ini dapat diindikasikan bahwa keberadaan jaringan kantor perbankan syariah tidak dapat menambah jumlah nasabah simpanan perbankan syariah. Disamping itu, indikasi lainnya adalah dikarenakan jaringan kantor perbankan syariah yang kurang terjangkau aksesnya kepada masyarakat, sehingga mereka lebih memilih perbankan yang aksesnya lebih terjangkau, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Qodriyah (2016).

### **Pengaruh Jaringan ATM**

ATM merupakan singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Automatic Teller Machine*. ATM di Indonesia memiliki tiga jenis, ATM non tunai, ATM tarik tunai dan ATM setor tarik tunai. ATM non tunai hanya diperuntukkan transaksi-transaksi yang bersifat non tunai, seperti pembayaran listrik, pembelian pulsa dan lain sebagainya. ATM tarik tunai secara umum digunakan oleh nasabah untuk menarik tunai sejumlah uang yang mereka miliki di rekening, namun ATM tarik tunai juga dapat difungsikan untuk transaksi lainnya yang bersifat non tunai. ATM setor tarik tunai dapat digunakan oleh nasabah tidak hanya untuk melakukan transaksi penarikan uang secara tunai, akan tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan transaksi setor tunai.

ATM merupakan salah satu dari sekian banyak *e-channel* perbankan yang dapat difungsikan oleh nasabah selama 24 jam. Sifatnya yang dapat difungsikan selama 24 jam untuk bertransaksi, menjadikan ATM sebagai sarana kedua dalam melakukan transaksi keuangan setelah jaringan kantor. Akses masyarakat dan nasabah dalam menggunakan ATM menjadi suatu pertimbangan dalam menggunakan produk perbankan. Berdasarkan hasil uji VECM (tabel 4), ATM berpengaruh terhadap DPK perbankan syariah. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa mayoritas nasabah telah memilih jaringan ATM dalam melakukan transaksi keuangan di perbankan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Abdallah & Lubis (2015) menyatakan bahwa ATM merupakan salah satu fasilitas yang penting oleh nasabah dalam menggunakan produk perbankan. Jaringan ATM merupakan salah satu titik akses nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan, sehingga menjadikan ATM sebagai salah satu fasilitas yang penting dan perlu dipertimbangkan bagi masyarakat dalam membuka rekening di suatu perbankan syariah. Berdasarkan hasil analisis *granger causality test* (tabel 8) menyatakan bahwa variabel jaringan ATM dan jaringan kantor memiliki hubungan kausalitas dua arah. Hal tersebut diindikasikan karena pada faktanya dilapangan, mayoritas ATM milik perbankan syariah hanya dapat ditemui di kantor perbankan syariah.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS), ATM yang dimiliki oleh perbankan syariah di Indonesia mengalami penurunan, sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:

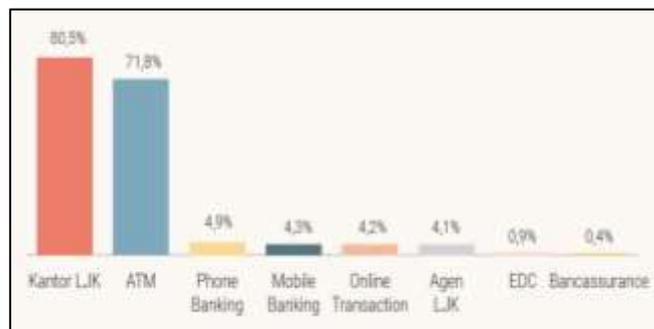


**Gambar 6.** Jumlah ATM Perbankan Syariah

Sumber: Data Diolah

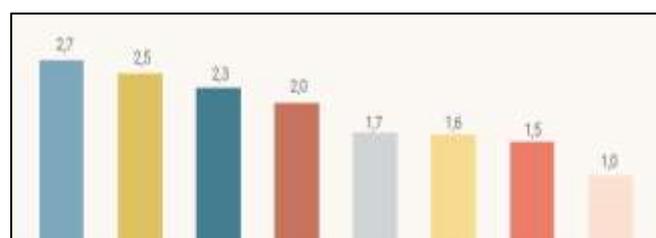
Penurunan jumlah ATM sebagaimana gambar 6 di atas dapat disebabkan oleh sinergi yang dibangun oleh perbankan syariah dengan perbankan konvensional sebagai perusahaan induknya, sehingga dimungkinkan perbankan syariah dapat melakukan efisiensi dalam pengadaan mesin ATM. Sinergi yang dimaksud adalah kerjasama penggunaan ATM perbankan konvensional yang juga dapat digunakan sebagai ATM perbankan syariah, sehingga nasabah perbankan syariah juga dapat memanfaatkan jaringan ATM perbankan konvensional yang sudah ada dengan jaringan yang lebih luas.

Walaupun perbankan syariah telah bersinergi dengan perbankan konvensional dalam pemanfaatan jaringan ATM, akan tetapi pemanfaatannya masih terbatas, sesuai dengan strategi dan kebijakan masing-masing perbankan. Padahal ATM merupakan salah satu fasilitas yang penting bagi nasabah dan juga fasilitas yang paling banyak digunakan oleh nasabah (Gambar 7). Selain itu, ATM juga menjadi fasilitas *delivery channel* yang paling tinggi frekuensi penggunaannya di Indonesia perbulannya (Gambar 8).



**Gambar 7.** Delivery Channel Paling Banyak Digunakan

Sumber: OJK (2017)



### **Gambar 8.** Frekuensi Penggunaan *Delivery Channel* Perbulan

Sumber: OJK (2017)

Hasil uji VECM yang lain menyatakan bahwa jaringan ATM berpengaruh terhadap jumlah nasabah perbankan syariah. Hal ini dapat diindikasikan bahwa nasabah juga mempertimbangkan faktor jaringan ATM dalam memilih perbankan syariah sebagai salah satu fasilitas dalam produk simpanan perbankan, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Abdallah & Lubis (2015). Gambar 7 dan gambar 8 telah menggambarkan dengan jelas bahwa nasabah perbankan saat ini sudah terbiasa dalam menggunakan ATM dalam melakukan berbagai transaksi keuangan.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jaringan kantor perbankan syariah (KTR) tidak mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah nasabah simpanan (NSB) pada perbankan syariah.
2. Jaringan ATM perbankan syariah (ATM) berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jumlah nasabah simpanan (NSB) pada perbankan syariah.

#### **Saran dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis, penjelasan hingga kesimpulan, maka penulis menyarankan beberapa hal kepada para praktisi ataupun pihak lainnya yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Disarankan agar perbankan syariah memperluas akses kepada nasabah, terutama jaringan kantor perbankan syariah atau sejenis. Beberapa perbankan syariah saat ini telah menyediakan pembukaan rekening secara online, akan tetapi untuk melakukan setoran awal serta mendapatkan fasilitas kartu ATM, nasabah tetap harus melakukan transaksi di kantor perbankan syariah. Hendaknya setoran awal bisa dilakukan melalui mesin ATM dan mitra Laku Pandai, sehingga dapat mempermudah nasabah yang lokasinya jauh dengan jaringan kantor pelayanan perbankan syariah.

2. Menambah jaringan mesin ATM yang dimiliki oleh perbankan syariah agar dapat mempermudah nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, terutama jenis mesin ATM setor-tarik tunai (*ATM all in one*). *ATM all in one* dapat mengefisiensi perbankan syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah secara langsung (via teller). Disamping itu, nasabah juga akan lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan transaksi setor tunai ataupun transaksi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, M., & Lubis, I. (2015). ANALISIS MINAT MENABUNG PADA BANK SYARIAH DI KALANGAN SISWA SMA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS: SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(7).
- Al Arif, M. N. R., & Firmansyah, F. (2018). Laku pandai's program and deposit funds: study at bank of bri sharia. *Jurnal Ekonomi*, 23(01), 1-9. <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.329>
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bharali, R. K., & Borman, R. (2017). Mobile Banking for Financial Inclusion: Adoption and Challenges. *Splint International Journal of Professionals*, 4(6), 75-80.
- BI. (2014). *Buku Saku Keuangan Inklusif* (eBook). Jakarta: Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.
- Darmawan, A., Indahsari, N. D., Rejeki, S., Aris, M. R., & Yasin, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah. *Jurnal Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 18(01), 43-52. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- DPNP-OJK. (2015). *Buku Saku Laku Pandai* (e Book). Jakarta.
- Fahrudin, M. F., & Yulianti, E. (2015). Pengaruh promosi, lokasi, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian nasabah Bank Mandiri Surabaya. *Journal of Business & Banking*, 5(1), 149-162. <https://doi.org/10.14414/jbb.v5i1.478>
- Hakim, A. (2017). *Pengantar Ekonometrika Time Series*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Hidayanti, R. (2016). Pengaruh BI Rate, Inflasi dan Jumlah Kantor Cabang terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 4(3). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jaya, I. G. N. A. A., & Setiawina, N. D. (2018). Factors affecting customer using agent bank Laku Pandai program in Bali. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 2(2), 194-213. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v2n2.165>
- Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1), 36-42. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol3.iss1/art5>

- Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). Financial inclusion and economic growth in OIC countries. *Research in International Business and Finance*, 43, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178>
- Margaretha, F. (2015). DAMPAK ELECTRONIC BANKING TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 19(3), 514-524. Retrieved from <http://jurkubank.wordpress.com>
- Muhamad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, L. N., Sari, P. B., & Dwilita, H. (2013). DETERMINAN KEUANGAN INKLUSIF DI SUMATERA UTARA, INDONESIA. *JESP: Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(1), 58-66.
- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *ETIKONOMI*, 14(2), 221-240. <https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>
- OJK. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta.
- OJK. (2019). *Data Perkembangan Program Laku Pandai*. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Ouma, S. A., Odongo, T. M., & Were, M. (2017). Mobile financial services and financial inclusion: Is it a boon for savings mobilization? *Review of Development Finance*, 7, 29-35. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2017.01.001>
- Perpres. *Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Literasi dan Inklusi Keuangan*. , (2016).
- Pertiwi, D., & Ritonga, H. D. (2012). ANALISIS MINAT MENABUNG MASYARAKAT PADA BANK MUAMALAT DI KOTA KISARAN. *Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 61-69.
- POJK. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat*. , (2016).
- Prasetya, B., Tan, S., & Delis, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(2), 91-100.
- Putri, A. H., & Yusuf, M. (2017). ANALISIS DAMPAK PROGRAM LAKU PANDAI TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, PERTUMBUHAN LIKUIDITAS DAN PERTUMBUHAN PROFITABILITAS. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1-8. <https://doi.org/10.35829/magisma.v5i1.8>
- Qodriyah, I. L. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menabung Di Bank Muamalat Cabang Madiun. *7th Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (FIPA)*, 1-13.
- Rifa'i, A. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM. *IKONOMIKA*, 4(2), 192-217. <https://doi.org/10.24042/febi.v2i2.1639>
- Sarah, H. (2015). Dampak Branchless Banking Terhadap Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Impact of Branchless Banking on Financial Performance of PT Bank Muamalat

Indonesia Tbk 1 Pendahuluan. *Jurnal Al-Muzara'Ah* (Issnp:2337-6333;E;2355-4363, 3(2), 136-157.

Soetiono, K. S., & Setiawan, C. (2018). *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

SPS-OJK. *Statistik Perbankan Syariah 2015-2018*. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

UU. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews (Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.